

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan Maret 2021, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,24% (mtm). Tekanan inflasi di Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,08% (mtm) dan capaian inflasi NTB historis selama 3 tahun (2018 - 2020) yang deflasi sebesar 0,15% (mtm).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi pada bulan Maret 2021 terutama bersumber dari kelompok bahan makanan bergejolak (Volatile Food/VF) yang masih tercatat cukup tinggi sebesar 0,84% (mtm) akibat keterbatasan pasokan cabai rawit, bawang putih, tongkol diawetkan dan ikan layang/ikan bonggol.

Kelompok Administered Prices (AP) juga mengalami inflasi sebesar 0,73% (mtm) disebabkan oleh peningkatan tarif air minum PAM. Selanjutnya kelompok komoditas Core Inflation (CI) juga mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm). Secara spasial, pada bulan Maret 2021, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,34% (mtm) dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

(i) menjaga kestabilan harga di pasar melalui sidak pasar baik ke distributor maupun pedagang eceran; (ii) menjaga kelancaran distribusi dengan menjaga jalur logistik dan ekspedisi baik untuk angkutan udara, laut, dan darat;

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kegiatan rapat TPID seharusnya dilakukan dengan lebih sering dan berkala

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan koordinasi TPID yang lebih erat